STRATEGI PENGUATAN MODERASI BERAGAMA MELALUI PROGRAM HARMONI DAN ASESMEN MODERASI BERAGAMA DI MAN 1 JEMBRANA BALI

Ajeng Nur Usfatun Khasanah
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,Indonesia
e-mail: ajeng.nur.usfatun.khasanah24087@mhs.uingusdur.ac.id

Ahmad Ta'rifin
, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,Indonesia
e-mail: ahmad.tarifin@uingusdur.ac.id

Eka Faidah Khasanah
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,Indonesia
e-mail: eka.faidah.khasanah24098@mhs.uingusdur.ac.id

Nandya Ayu Salsabila
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,Indonesia
e-mail: nandya.ayu.salsabila24089@mhs.uingusdur.ac.id

Hikmah Fitriani
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,Indonesia
e-mail: hikma.fitriani24081@mhs.uingusdur.ac.id

Ilham Bintang
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,Indonesia
e-mail: ilham.bintang24096@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract: Religious moderation has been a priority program of the Indonesian Ministry of Religious Affairs since 2019 to preserve diversity and prevent extremist attitudes, including in madrasah education. This study aims to describe and analyze the strategy for strengthening religious moderation through the Harmoni Program and the religious moderation assessment at MAN 1 Jembrana, Bali, a madrasah located in a multicultural and multi-religious community. It employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews with the head of madrasah, vice principals for curriculum and student affairs, Islamic education teachers, and students, and documentation review, then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, with source and technique triangulation. The findings show that religious moderation is strengthened through three managerial stages: planning integrated into the madrasah's vision and mission; implementation of the Harmoni Program through interfaith activities, dialogue, and habituation of tolerance in school life; and evaluation through an assessment instrument adapted from the Ministry's indicators of national commitment, tolerance, non-violence, and accommodation of local culture. The program contributes to students' moderate character, while the assessment serves as a mapping and feedback instrument for continuous improvement. The study recommends

institutionalizing the assessment periodically and strengthening collaboration with local interfaith figures.

Keywords: religious moderation; Harmoni Program; religious moderation assessment; educational management; madrasah

Abstrak: Moderasi beragama telah menjadi program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia sejak tahun 2019 untuk menjaga keberagaman dan mencegah sikap ekstremisme, termasuk dalam pendidikan madrasah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi penguatan moderasi beragama melalui Program Harmoni serta penilaian moderasi beragama di MAN 1 Jembrana, Bali, sebuah madrasah yang terletak di tengah-tengah masyarakat multikultural dan multireligius. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kurikulum dan kemahasiswaan, guru pendidikan Islam, dan siswa, serta tinjauan dokumentasi; data kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik.Temuan penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama diperkuat melalui tiga tahap manajerial: perencanaan yang terintegrasi ke dalam visi dan misi madrasah; pelaksanaan Program Harmoni melalui kegiatan antaragama, dialog, dan penanaman kebiasaan toleransi dalam kehidupan sekolah; serta evaluasi melalui instrumen penilaian yang diadaptasi dari indikator Kementerian mengenai komitmen nasional, toleransi, non-kekerasan, dan akomodasi terhadap budaya lokal. Program ini berkontribusi pada pembentukan karakter moderat siswa, sementara penilaian tersebut berfungsi sebagai alat pemetaan dan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Studi ini merekomendasikan agar penilaian tersebut dilembagakan secara berkala dan memperkuat kolaborasi dengan tokoh-tokoh antaragama setempat.

Kata kunci: moderasi beragama; Program Harmoni; penilaian moderasi beragama; manajemen pendidikan; madrasah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman agama, suku, dan budaya yang sangat tinggi. Kondisi ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan tersendiri, terutama ketika perbedaan tidak dikelola dengan baik sehingga berpotensi memicu konflik dan sikap eksklusif dalam beragama. Merespons kondisi tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia sejak tahun 2019 menetapkan moderasi beragama sebagai salah satu program prioritas nasional, yang kemudian dituangkan dalam berbagai

kebijakan dan panduan, termasuk buku *Moderasi Beragama* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI sebagai rujukan konseptual utama.[1]

Moderasi beragama dimaknai sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku beragama secara seimbang antara pengalaman ajaran agama sendiri dengan penghormatan terhadap praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Empat indikator utama moderasi beragama yang dikembangkan Kementerian Agama meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi atau budaya lokal.[2] Keempat indikator ini menjadi acuan dalam merancang berbagai kebijakan pendidikan keagamaan, termasuk di lingkungan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Madrasah memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama sejak dini kepada peserta didik. Berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi moderasi beragama di madrasah dilakukan melalui integrasi nilai ke dalam pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Kajian di Kalimantan Timur misalnya menunjukkan bahwa internalisasi nilai moderasi beragama pada madrasah aliyah negeri dilakukan melalui pembelajaran, budaya sekolah, dan keteladanan kepala madrasah.[3] Kajian lain di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa implementasi program moderasi beragama pada madrasah dipengaruhi oleh faktor komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi, sementara tantangan implementasi kerap muncul pada madrasah di wilayah yang sulit dijangkau dan minim akses informasi.[4] Sementara itu, kajian di tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten menemukan bahwa integrasi moderasi beragama ke dalam kurikulum madrasah binaan telah berjalan meski kualitasnya bervariasi, dan era digital

[1]Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).
[2]Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*.
[3]H. A. Al-Anshori, B. Suharto, dan M. Ilyasin, "Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama pada Madrasah Aliyah Negeri di Kalimantan Timur," *Scholastica: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 4, no. 2 (2022): 22–33.
[4]S. Salsabila dan A. Frinaldi, "Implementasi Program Moderasi Beragama pada Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 17581–17588.

menjadi tantangan tersendiri akibat paparan konten intoleran serta keterbatasan kompetensi digital guru.[5]

MAN 1 Jembrana Bali merupakan salah satu madrasah yang berada di tengah masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, sehingga posisinya cukup unik dibandingkan madrasah pada umumnya yang berada di lingkungan masyarakat mayoritas Muslim. Kondisi sosial-keagamaan tersebut menuntut manajemen madrasah untuk merancang strategi khusus dalam menanamkan moderasi beragama, tidak hanya sebagai materi ajar, tetapi juga sebagai budaya dan praktik keseharian madrasah. Salah satu strategi yang dikembangkan MAN 1 Jembrana Bali adalah Program Harmoni, yaitu program penguatan moderasi beragama yang diwujudkan melalui kegiatan lintas agama, dialog antarumat beragama, dan pembiasaan sikap toleran dalam interaksi sosial di madrasah. Program ini kemudian dilengkapi dengan instrumen asesmen moderasi beragama sebagai alat ukur untuk memetakan tingkat pemahaman dan sikap moderat peserta didik, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan perbaikan program secara berkelanjutan.

Berbeda dengan sebagian besar penelitian moderasi beragama di madrasah yang lebih banyak berfokus pada integrasi nilai dalam kurikulum atau pembelajaran Pendidikan Agama Islam semata, penelitian ini memberikan penekanan pada dua aspek yang relatif belum banyak dikaji secara bersamaan, yaitu program penguatan moderasi berbasis kegiatan lintas agama (Program Harmoni) dan instrumen asesmen moderasi beragama sebagai bagian dari siklus manajemen program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan perencanaan dan pelaksanaan Program Harmoni di MAN 1 Jembrana Bali; (2) menganalisis penggunaan asesmen moderasi beragama sebagai instrumen evaluasi program; dan (3) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penguatan moderasi beragama melalui manajemen pendidikan di madrasah tersebut.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian manajemen pendidikan Islam, khususnya

[5]E. F. Maftuhah dan S. Minarti, "Analisis Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama dalam Pendidikan Madrasah di Era Digital," *Sindoro: Cendikia Pendidikan* 18, no. 6 (2026): 2381–2390.

mengenai pengelolaan program penguatan moderasi beragama di madrasah yang berada pada konteks sosial-keagamaan minoritas. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola madrasah, guru, dan Kementerian Agama dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program penguatan moderasi beragama yang kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena manajemen program dalam konteks alamiahnya. Lokasi penelitian adalah MAN 1 Jembrana, Bali, dengan pertimbangan bahwa madrasah tersebut memiliki program moderasi beragama yang khas, yaitu Program Harmoni dan asesmen moderasi beragama, serta berada pada konteks sosial-keagamaan yang majemuk.

Subjek penelitian ditentukan secara purposif, meliputi kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kurikulum, wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, serta beberapa perwakilan peserta didik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu: (1) observasi partisipatif terhadap pelaksanaan kegiatan Program Harmoni dan proses asesmen moderasi beragama; (2) wawancara semi-terstruktur untuk menggali persepsi, strategi, dan pengalaman informan; dan (3) studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan program, kurikulum, instrumen asesmen, serta laporan evaluasi madrasah.

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.[6] Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi antar informan) dan triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi) sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai strategi penguatan moderasi beragama di madrasah tersebut.

[6]M. B. Miles, A. M. Huberman, dan J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. ke-3 (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014).

PEMBAHASAN

A. Perencanaan Program Harmoni dalam Kebijakan Madrasah

Perencanaan Program Harmoni di MAN 1 Jembrana Bali dilakukan dengan mengintegrasikan nilai moderasi beragama ke dalam visi, misi, dan rencana kerja madrasah. Kepala madrasah bersama wakil kepala bidang kurikulum dan kesiswaan merumuskan program ini sebagai respons terhadap konteks sosial madrasah yang berada di tengah masyarakat mayoritas Hindu, sehingga penguatan sikap toleran dan saling menghormati menjadi kebutuhan nyata, bukan sekadar materi normatif.

Dalam tahap perencanaan, madrasah menetapkan tujuan Program Harmoni, yaitu menumbuhkan sikap saling menghargai antarumat beragama, membiasakan dialog dan kerja sama lintas agama, serta mencegah tumbuhnya sikap intoleran maupun eksklusif di kalangan peserta didik. Perencanaan ini juga memuat penetapan kegiatan, jadwal, pihak yang terlibat (termasuk tokoh lintas agama setempat), serta indikator keberhasilan program yang kemudian menjadi dasar penyusunan instrumen asesmen moderasi beragama.

B. Pelaksanaan Program Harmoni: Integrasi Kurikulum dan Pembiasaan

Pelaksanaan Program Harmoni di MAN 1 Jembrana Bali dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu integrasi ke dalam pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan peringatan hari besar, serta pembiasaan interaksi sosial sehari-hari di lingkungan madrasah. Pada jalur pembelajaran, nilai moderasi beragama diintegrasikan terutama pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti serta mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, sejalan dengan temuan riset lain yang menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai moderasi beragama ke dalam pembelajaran menjadi salah satu strategi utama madrasah dalam menanamkan sikap moderat kepada peserta didik.[7]

Pada jalur kegiatan, Program Harmoni diwujudkan antara lain melalui kunjungan lintas rumah ibadah, dialog dan diskusi bersama tokoh lintas agama,

[7]S. Chadidjah dkk., "Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI (Tinjauan Analisis pada Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi)," *Al-Hasanah: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2021): 115.

kegiatan sosial bersama komunitas Hindu setempat, serta perayaan hari besar keagamaan secara inklusif yang melibatkan partisipasi peserta didik dari berbagai latar belakang. Kegiatan semacam ini memperkuat pemahaman peserta didik bahwa moderasi beragama bukan sekadar materi hafalan, melainkan pengalaman nyata berinteraksi dengan pemeluk agama lain secara terbuka dan saling menghormati.

Pada jalur pembiasaan, madrasah menanamkan sikap toleran melalui keteladanan guru, tata tertib madrasah yang menekankan penghormatan terhadap perbedaan, serta pembiasaan sapaan dan interaksi sosial yang inklusif di lingkungan sekolah.

C. Asesmen Moderasi Beragama sebagai Instrumen Evaluasi Program

Salah satu kekhasan MAN 1 Jembrana Bali adalah penggunaan asesmen moderasi beragama sebagai instrumen evaluasi, yang diadaptasi dari empat indikator moderasi beragama Kementerian Agama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan akomodasi terhadap budaya lokal.[8] Asesmen ini digunakan untuk memetakan sikap dan pemahaman moderasi beragama peserta didik secara berkala, baik pada awal maupun akhir pelaksanaan Program Harmoni, sehingga madrasah memperoleh data mengenai perkembangan sikap moderat peserta didik dari waktu ke waktu.

Hasil asesmen tersebut kemudian digunakan sebagai dasar umpan balik bagi perbaikan program, misalnya penambahan kegiatan dialog lintas agama pada aspek toleransi yang skornya relatif masih rendah, atau penguatan kegiatan kebangsaan pada aspek komitmen kebangsaan. Penggunaan asesmen semacam ini melengkapi model evaluasi moderasi beragama yang selama ini lebih banyak bersifat deskriptif-kualitatif tanpa instrumen terstandar, sehingga menjadi salah satu nilai kebaruan penting dalam pengelolaan program moderasi beragama di tingkat satuan pendidikan.

[8]Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat

Beberapa faktor pendukung keberhasilan Program Harmoni di MAN 1 Jembrana Bali antara lain: dukungan penuh kepala madrasah dan keteladanan pimpinan; keterbukaan komunitas Hindu setempat untuk berkolaborasi dalam kegiatan lintas agama; serta budaya masyarakat Bali yang secara historis terbiasa hidup berdampingan dalam keberagaman. Sementara itu, faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi keterbatasan waktu pembelajaran khusus untuk kegiatan moderasi beragama, ketergantungan program pada individu-individu kunci tertentu, serta belum optimalnya pelembagaan asesmen moderasi beragama sebagai bagian permanen dari kalender akademik madrasah.

ANALISIS

A. Perencanaan Program Harmoni dalam Perspektif Implementasi Kebijakan

Perencanaan tersebut sejalan dengan temuan bahwa faktor komunikasi, disposisi pimpinan, dan struktur birokrasi madrasah turut memengaruhi keberhasilan implementasi program moderasi beragama pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama, di mana dukungan dan keteladanan pimpinan madrasah menjadi kunci penggerak program.[9]

Proses perencanaan tersebut dapat dibaca melalui kerangka teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan standar dan tujuan kebijakan, karakteristik badan pelaksana, serta disposisi atau sikap para pelaksana di lapangan.[10] Dalam konteks MAN 1 Jembrana Bali, kejelasan tujuan Program Harmoni tercermin dari perumusan visi dan misi madrasah yang secara eksplisit memuat nilai moderasi beragama, sementara disposisi pelaksana tampak dari komitmen kepala madrasah beserta wakil kepala bidang kurikulum dan kesiswaan dalam merancang program secara partisipatif.

Perencanaan semacam ini penting untuk menghindari kecenderungan implementasi kebijakan moderasi beragama yang bersifat formalistik atau sekadar menjalankan instruksi dari Kementerian Agama tanpa penyesuaian

[9]Salsabila dan Frinaldi, "Implementasi Program Moderasi Beragama."
[10]D. S. Van Meter dan C. E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445–488.

terhadap konteks lokal. Sebagaimana ditemukan pada madrasah di wilayah lain, implementasi program moderasi beragama sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi[11], sehingga tanpa perencanaan yang kontekstual, program tersebut berisiko berhenti pada tataran seremonial semata. Perencanaan Program Harmoni yang berangkat dari kebutuhan riil masyarakat Bali yang majemuk menunjukkan upaya MAN 1 Jembrana Bali untuk menghindari jebakan formalisme tersebut, sekaligus menegaskan bahwa perencanaan berbasis konteks lokal menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan moderasi beragama di tingkat satuan pendidikan.

Perencanaan di MAN 1 Jembrana Bali juga menarik untuk dibandingkan dengan temuan pada madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yang berada pada konteks sosial-keagamaan mayoritas Muslim dan menghadapi tantangan implementasi yang lebih banyak bersumber dari faktor birokrasi internal serta keterbatasan akses informasi di wilayah yang sulit dijangkau.[12] Sementara itu, tantangan perencanaan di MAN 1 Jembrana Bali justru lebih banyak bersumber dari kebutuhan menyesuaikan program dengan konteks sosial-keagamaan yang plural, bukan dari kendala geografis maupun birokrasi semata. Perbandingan ini menunjukkan bahwa faktor kontekstual yang memengaruhi perencanaan program moderasi beragama dapat sangat beragam antarmadrasah, sehingga pendekatan perencanaan yang seragam secara nasional perlu diimbangi dengan ruang penyesuaian di tingkat satuan pendidikan.

B. Pelaksanaan Program Harmoni dalam Perspektif Teori Kontak dan Pembelajaran Sosial

Strategi pembiasaan ini konsisten dengan hasil kajian yang menunjukkan bahwa solusi implementasi moderasi beragama di madrasah antara lain dilakukan melalui pemberian ruang diskusi bagi peserta didik, keteladanan guru dalam berperilaku, serta penciptaan lingkungan sekolah yang mendukung nilai-nilai

[11]Salsabila dan Frinaldi, "Implementasi Program Moderasi Beragama."
[12]Salsabila dan Frinaldi, "Implementasi Program Moderasi Beragama."

moderasi.[13] Temuan ini juga sejalan dengan kajian tentang budaya toleransi beragama di sekolah Indonesia, yang menegaskan bahwa budaya sekolah inklusif tumbuh dari kombinasi kebijakan resmi dan praktik keseharian yang konsisten.[14]

Aktivitas lintas agama dalam Program Harmoni, seperti kunjungan lintas rumah ibadah dan dialog bersama tokoh lintas agama, sejalan dengan teori kontak antarkelompok yang dikemukakan Allport, yang menyatakan bahwa kontak antarkelompok dapat mengurangi prasangka apabila berlangsung dalam kondisi kesetaraan status, tujuan bersama, kerja sama, dan dukungan institusional.[15] Keempat kondisi tersebut tampak terpenuhi dalam pelaksanaan Program Harmoni: peserta didik dan komunitas Hindu setempat terlibat sebagai mitra yang setara dalam kegiatan sosial bersama, bukan sekadar objek kunjungan, sementara dukungan institusional diberikan langsung oleh manajemen madrasah melalui pengintegrasian kegiatan tersebut ke dalam kalender akademik.

Sementara itu, penekanan pada keteladanan guru dalam jalur pembiasaan dapat dijelaskan melalui teori pembelajaran sosial Bandura, yang menegaskan bahwa individu belajar sikap dan perilaku baru terutama melalui observasi dan peniruan terhadap figur yang dianggap kredibel dan relevan, seperti guru di lingkungan sekolah.[16] Dalam konteks ini, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi moderasi beragama, tetapi juga sebagai model perilaku toleran yang diamati dan ditiru oleh peserta didik dalam interaksi sosial sehari-hari, sehingga keteladanan guru menjadi salah satu mekanisme utama internalisasi nilai moderasi beragama di luar jalur pembelajaran formal.

Pelaksanaan Program Harmoni juga memperlihatkan perbedaan yang menarik apabila dibandingkan dengan pelaksanaan moderasi beragama pada madrasah dengan lingkungan peserta didik yang relatif homogen dari sisi agama, seperti pada kasus MTsN 6 Cianjur dan MTs Al-Ihsan Baleendah Bandung, yang menghadapi keterbatasan kesempatan praktik interaksi antarpemeluk agama

[13]D. A. Kohar dkk., "Implementasi Moderasi Beragama di Madrasah, Tantangan dan Solusinya," *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2024), https://doi.org/10.30868/im.v7i02.6887.
[14]R. Raihani, "Creating a Culture of Religious Tolerance in an Indonesian School," *South East Asia Research* 22, no. 4 (2014), https://doi.org/10.5367/sear.2014.0234.
[15]G. W. Allport, *The Nature of Prejudice* (Cambridge, MA: Addison-Wesley, 1954).
[16]A. Bandura, *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977).

berbeda karena seluruh pihak yang terlibat beragama Islam.[17] Kondisi sosial-keagamaan MAN 1 Jembrana Bali yang berada di tengah masyarakat mayoritas Hindu justru memberi ruang alamiah bagi peserta didik untuk mempraktikkan nilai moderasi beragama secara langsung dalam interaksi lintas agama sehari-hari, sehingga pembelajaran mengenai moderasi beragama tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat diuji dan dialami secara nyata dalam kehidupan sosial di lingkungan madrasah.

C. Asesmen Moderasi Beragama sebagai Pengelolaan Berbasis Data

Keberadaan asesmen moderasi beragama ini juga menunjukkan pergeseran orientasi pengelolaan program dari sekadar pelaksanaan kegiatan (*activity-based*) menuju pengelolaan berbasis data dan bukti (*evidence-based management*), yang memungkinkan kepala madrasah dan guru melakukan penyesuaian program secara lebih terarah berdasarkan kebutuhan riil peserta didik, bukan semata berdasarkan asumsi atau kebiasaan tahun-tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, penggunaan asesmen moderasi beragama pada tingkat madrasah ini masih perlu dicermati dari sisi metodologis, khususnya terkait validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Instrumen yang diadaptasi langsung dari indikator konseptual Kementerian Agama tanpa melalui uji validitas dan reliabilitas secara empiris berisiko menghasilkan data yang kurang akurat dalam menggambarkan sikap moderasi beragama peserta didik secara sesungguhnya. Oleh karena itu, upaya pelembagaan asesmen ini ke depan perlu disertai dengan pengujian psikometrik yang memadai, termasuk uji validitas konstruk dan konsistensi internal, agar hasil asesmen dapat lebih dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Di sisi lain, keberadaan asesmen ini membuka peluang bagi madrasah lain untuk mengadopsi pendekatan serupa dalam mengevaluasi program moderasi beragama, sepanjang disertai dengan adaptasi terhadap konteks sosial-keagamaan masing-masing satuan pendidikan. Pelaksanaan asesmen secara berkala, yang diikuti dengan siklus perbaikan program berdasarkan hasil pemetaan, mencerminkan pola pengelolaan program yang berorientasi pada perbaikan

[17]Kohar dkk., "Implementasi Moderasi Beragama di Madrasah."

berkelanjutan, sehingga moderasi beragama tidak lagi dipandang sebagai program sekali jalan, melainkan sebagai proses pembinaan sikap yang terus dievaluasi dan disesuaikan dari waktu ke waktu.

Pendekatan asesmen berbasis instrumen internal madrasah pada penelitian ini juga berbeda dengan model pemantauan program moderasi beragama yang bersumber dari mekanisme pembinaan dan supervisi Kantor Kementerian Agama, sebagaimana ditemukan pada penelitian mengenai kebijakan moderasi beragama di lingkungan Kemenag Kabupaten Bojonegoro, yang datanya dihimpun secara tidak langsung melalui laporan hasil supervisi pengawas terhadap madrasah binaan.[18] Model evaluasi yang bersumber dari laporan supervisi eksternal semacam itu memiliki keunggulan pada aspek objektivitas pihak ketiga, tetapi berpotensi kurang menangkap dinamika internal madrasah secara mendalam. Sebaliknya, instrumen asesmen yang dikembangkan dan dikelola langsung oleh MAN 1 Jembrana Bali memungkinkan pemantauan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik, meskipun di sisi lain menuntut kapasitas internal madrasah yang memadai untuk menjaga objektivitas dan konsistensi pelaksanaan asesmen dari waktu ke waktu.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat: Modal Sosial dan Keberlanjutan Program

Faktor penghambat tersebut sejalan dengan kajian lain yang menyebutkan keterbatasan jam khusus dan tantangan pemerataan pembinaan sebagai kendala umum implementasi moderasi beragama di satuan pendidikan.[19]Faktor pendukung berupa keterbukaan komunitas Hindu setempat dan budaya masyarakat Bali yang terbiasa hidup berdampingan dalam keberagaman juga dapat dipahami melalui kajian mengenai praktik moderasi dalam ajaran Hindu di Bali, yang menunjukkan bahwa konsep Tri Kerangka Agama Hindu turut menanamkan nilai keseimbangan dan penghormatan terhadap keberagaman dalam kehidupan beragama masyarakat setempat.[20] Nilai-nilai lokal semacam ini berfungsi sebagai

[18]Maftuhah dan Minarti, "Analisis Implementasi Kebijakan."
[19]Kohar dkk., "Implementasi Moderasi Beragama di Madrasah."
[20]I. G. C. Bagus, "Praktik Moderasi Hindu dalam Tri Kerangka Agama Hindu di Bali," *Prosiding Seminar Nasional Moderasi Beragama STHD* 1, no. 1 (2020): 110–118.

modal sosial yang memudahkan penerimaan komunitas Hindu terhadap kehadiran madrasah dan kegiatan lintas agama yang diselenggarakan melalui Program Harmoni.

Pola penerimaan semacam ini sejalan dengan kajian mengenai adaptasi antaretnis di wilayah lain di Indonesia, yang menunjukkan bahwa interaksi sosial yang intensif dan berkelanjutan antarkelompok yang berbeda latar belakang etnis maupun keagamaan dapat mendorong terbentuknya pola akomodasi budaya dan sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari.[21] Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa keberhasilan Program Harmoni di MAN 1 Jembrana Bali tidak semata-mata merupakan hasil dari manajemen program madrasah, tetapi juga ditopang oleh modal sosial dan kondisi sosial-budaya masyarakat Bali yang secara historis terbuka terhadap keberagaman.

Adapun faktor penghambat berupa ketergantungan program pada individu-individu kunci tertentu perlu mendapat perhatian khusus dari manajemen madrasah, sebab keberlangsungan Program Harmoni akan rentan terganggu apabila terjadi pergantian kepala madrasah atau guru penggerak utama program tanpa disertai proses transfer pengetahuan dan tanggung jawab yang memadai kepada penerusnya. Untuk mengatasi hal ini, madrasah perlu mendokumentasikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program Harmoni secara sistematis, sehingga pengetahuan mengenai pengelolaan program tidak hanya melekat pada individu tertentu, melainkan menjadi bagian dari memori kelembagaan madrasah yang dapat diwariskan kepada kepemimpinan berikutnya. Penguatan kelembagaan semacam ini juga sejalan dengan rekomendasi pelembagaan asesmen moderasi beragama secara berkala dalam kalender akademik, sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan keberlanjutan program pada figur-figur tertentu semata.

[21]E. Gusvan, "Pola Adaptasi Etnis Bali terhadap Etnis Jawa di Desa Paya Tusam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat" (Skripsi, Universitas Negeri Medan, 2018), http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/32032.

KESIMPULAN

Penguatan moderasi beragama di MAN 1 Jembrana Bali dilaksanakan melalui pendekatan manajemen program yang utuh, mencakup perencanaan yang terintegrasi dengan visi-misi madrasah, pelaksanaan Program Harmoni melalui integrasi kurikulum, kegiatan lintas agama, dan pembiasaan interaksi sosial yang inklusif, serta evaluasi melalui instrumen asesmen moderasi beragama yang diadaptasi dari indikator Kementerian Agama. Program Harmoni berkontribusi nyata terhadap penguatan karakter moderat peserta didik, sedangkan asesmen moderasi beragama berperan penting sebagai instrumen pemetaan dan umpan balik bagi perbaikan program secara berkelanjutan, menjadikan pengelolaan moderasi beragama di madrasah ini lebih berbasis data dibandingkan sekadar pelaksanaan kegiatan seremonial. Faktor pendukung utama berupa dukungan kepala madrasah, keterbukaan komunitas Hindu setempat, dan budaya masyarakat Bali yang terbiasa hidup berdampingan dalam keberagaman, sedangkan faktor penghambatnya meliputi keterbatasan waktu pembelajaran khusus, ketergantungan program pada individu kunci, dan belum optimalnya pelembagaan asesmen moderasi beragama dalam kalender akademik madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Anshori, H. A., B. Suharto, dan M. Ilyasin. "Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama pada Madrasah Aliyah Negeri di Kalimantan Timur." *Scholastica: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 4, no. 2 (2022): 22–33.

Allport, G. W. *The Nature of Prejudice*. Cambridge, MA: Addison-Wesley, 1954.

Bagus, I. G. C. "Praktik Moderasi Hindu dalam Tri Kerangka Agama Hindu di Bali." *Prosiding Seminar Nasional Moderasi Beragama STHD* 1, no. 1 (2020): 110–118.

Bandura, A. *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977.

Chadidjah, S., A. Kusnayat, U. Ruswandi, dan B. S. Arifin. "Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI (Tinjauan Analisis pada Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi)." *Al-Hasanah: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2021): 115.

Gusvan, E. "Pola Adaptasi Etnis Bali terhadap Etnis Jawa di Desa Paya Tusam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat." Skripsi, Universitas Negeri Medan, 2018. http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/32032.

Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Kohar, D. A., C. Budiyanto, U. Suherman, M. Mahmud, dan M. Erihadiana. "Implementasi Moderasi Beragama di Madrasah, Tantangan dan Solusinya." *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2024). https://doi.org/10.30868/im.v7i02.6887.

Maftuhah, E. F., dan S. Minarti. "Analisis Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama dalam Pendidikan Madrasah di Era Digital." *Sindoro: Cendikia Pendidikan* 18, no. 6 (2026): 2381–2390.

Miles, M. B., A. M. Huberman, dan J. Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.

Raihani, R. "Creating a Culture of Religious Tolerance in an Indonesian School." *South East Asia Research* 22, no. 4 (2014). https://doi.org/10.5367/sear.2014.0234.

Salsabila, S., dan A. Frinaldi. "Implementasi Program Moderasi Beragama pada Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 17581–17588.

Van Meter, D. S., dan C. E. Van Horn. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445–488.